

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menghindari kesalahpahaman pengguna yang beragam dalam memaknai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi SKPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah propinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar generasi

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- d. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No.1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008.
9. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
16. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014
17. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ekonomi Makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD
3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
4. Kebijakan akuntansi
5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
6. Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan
7. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Hal hal yang mempengaruhi penyusunan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, antara lain :

- **Kondisi Perumahan dan Permukiman di Jawa Timur**

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau.
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- Belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan sarana dan prasarana permukiman.
- Rendahnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung terutama didaerah rawan bencana yang berpenghuni

- **Kondisi Air Bersih dan Air Limbah**

- Rendahnya peningkatan pelayanan Air Bersih di perkotaan dan pedesaan khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air
- Tarif Air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya atau Cost Recovery.
- Terbatasnya pelayanan pengelolaan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

- **Sampah dan Drainase.**

- Masih belum efektifnya penerapan Reduce, Reuse dan Recycle dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
- Masih rendahnya kualitas pengelolaan manajemen dan teknis TPA yang 95 % meskipun didesain dengan sistem Sanitary Landfill tetapi dioperasikan dengan sisitem Open Dumping, sehingga menimbulkan akibat memburuknya kualitas lingkungan disekitarnya (pencemaran udara, tanah dan air tanah serta air permukiman).
- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari

rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.

- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak

- **Pengembangan Perkotaan**

- Tidak seimbang perkembangan perkotaan, antara kota – kota metropolitan/besar dengan kota – kota menengah dan kecil.
- Memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang menambah luasan kawasan kumuh perkotaan, hal ini lebih banyak dipicu adanya tekanan urbanisasi yang tidak terkendali.
- Pesatnya perkembangan sektor informal di perkotaan, namun kurang terkendali dalam hal pemanfaatan ruang terbuka dan fasilitas umum, sehingga menimbulkan kekumuhan dan kemacetan lalu lintas di perkotaan.
- Masih belum optimalnya penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

- **Masalah Penataan Ruang**

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja.
- Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- Belum dikembangkannya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat).

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam Penyusunan lingkup program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2009 - 2014, disesuaikan dengan :

- Peraturan Daerah Jawa Timur No. 10 Tahun 2013, Tanggal 9 Desember 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2014, Tanggal 3 September 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 83 Tahun 2013, Tanggal 9 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2014, Tanggal 3 September 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/910/KPTS/013/2012, Tanggal 23 Desember 2013 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
- Hasil Rapat Komisi / kunjungan Anggaran dalam rapat dengan Tim Anggaran maupun Instansi terkait,
- Tanggapan dan saran Panitia Anggaran dalam Rapat dengan Tim Anggaran maupun Instansi terkait,
- Nota Keuangan tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014.

Perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya:

Di tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mendapat anggaran sebesar :

- Untuk Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 1.103.000.000,00**
- Untuk Belanja Daerah sebesar **Rp. 120.795.204.000,00**

Adapun rinciannya sbb:

Tahun anggaran 2014 mendapat anggaran sebesar :

- Untuk Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 712.500.000,00**
- Untuk Belanja Daerah sebesar **Rp. 113.464.048.000,00**

Selama tahun 2014 mendapat perubahan anggaran menjadi sebesar :

- Untuk Pendapatan Daerah terdapat penambahan sebesar **Rp. 390.500.000,00**
- Untuk Belanja Daerah terdapat pengurangan sebesar **Rp. 7.331.156.000,00**

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 mendapat anggaran (setelah Perubahan) sebesar :

- Untuk Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 1.103.000.000,00**
- Untuk Belanja Daerah sebesar **Rp. 120.795.204.000,00**

Yang terdiri sbb :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I	PENDAPATAN DAERAH		
1.	Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 	1.103.000.000,00
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1.	Belanja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tambahan Penghasilan 	16.815.427.000,00
III.	BELANJA LANGSUNG		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Perkantoran 	322.000.000,00
2.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur 	208.200.000,00
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan 	5.935.127.000,00
4.	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana Air Limbah • Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan • Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air 	1.401.775.000,00 10.147.025.000,00 1.087.200.000,00
5.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan 	957.200.000,00

6.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh • Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir 	<p style="text-align: right;">1.269.726.000,00</p> <p style="text-align: right;">574.072.000,00</p>
7.	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase 	<p style="text-align: right;">6.301.200.000,00</p>
8.	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar • Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur • Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman • Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus • Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) • Dana Pendamping PNPM • Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim • Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur • Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman 	<p style="text-align: right;">4.870.348.500,00</p> <p style="text-align: right;">469.499.500,00</p> <p style="text-align: right;">3.663.584.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.447.023.000,00</p> <p style="text-align: right;">7.049.545.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.311.802.000,00</p> <p style="text-align: right;">47.659.450.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.955.000.000,00</p> <p style="text-align: right;">750.000.000,00</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman 	1.250.000.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi 	1.250.000.000,00
9.	Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan. • Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang. • Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur 	1.680.000.000,00 520.000.000,00 1.500.000.000,00
10.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Pengawasan pemanfaatan ruang • Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota • Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 	100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Target Pelayanan sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

a. Penanggulangan Kemiskinan

Secara rinci sasarannya adalah:

- Pemantapan dan pelestarian Gerdu Taskin
- Pengembangan infrastruktur perdesaan bagi masyarakat miskin
- Pembangunan daerah tertinggal
- Pengembangan kawasan miskin perkotaan

b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Secara rinci sasarannya adalah:

- Pengembangan perumahan
- Pemberdayaan komunitas perumahan
- Peningkatan kinerja pembangunan air minum dan air limbah
- Pengembangan kelembagaan pembangunan air minum dan air limbah
- Peningkatan kinerja pembangunan persampahan dan drainase
- Pengembangan kelembagaan pembangunan persampahan dan drainase
- Pengendalian kota-kota besar dan metropolitan

c. Optimalisasi Penataan Ruang

Secara rinci sasarannya adalah:

- Terwujudnya keseimbangan antar wilayah melalui percepatan pembangunan dalam satu sistem perencanaan wilayah yang sinergis dan terintegrasi.
- Tercapainya optimalisasi peran Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai media koordinasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

sebagai berikut:

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Jumlah anggaran tahun 2014 setelah perubahan	: Rp.	16.815.427.000,00
- Jumlah Realisasi belanja gaji	: Rp.	12.918.111.973,00
- Jumlah Realisasi Belanja Non Gaji	: Rp.	3.202.751.600,00
- Sisa Anggaran	: Rp.	694.563.427,00
- Prosentase	:	95,87 %

BELANJA LANGSUNG

- Jumlah anggaran tahun 2014 setelah perubahan	: Rp.	103.979.777.000,00
- Jumlah Realisasi	: Rp.	96.390.153.127,00
- Sisa Anggaran	: Rp.	7.589.623.873,00
- Prosentase	:	92,70 %

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

No.	Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Hasil/Keluaran	Satuan	Sasaran
I 1	1.03.0500.000.51 1.03.0500.000.511	<u>BELANJA TIDAK LANGSUNG</u> Belanja Pegawai	- Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	Orang	265
II 1	1.03.0500.000.52 <u>1.03.0500.01</u>	<u>BELANJA LANGSUNG</u> <u>Program Pelayanan Administrasi</u> <u>Perkantoran.</u>			
	1.03.0500.01.107	Administrasi Perkantoran	- Kinerja Aparatur terhadap Pelaksanaan Kegiatan Meningkat	Orang	40
2	<u>103.0500.07</u>	<u>Program Peningkatan Kapasitas</u> <u>Kelembagaan Pemerintah</u> <u>Daerah</u>			
	1.03.0500.07.098	Penyusunan Data Base SKPD Sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	- Tersusunnya Data Base SKPD Untuk menunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Software	1
4	<u>103.0500.09</u>	<u>Program Peningkatan Kualitas</u> <u>Pelayanan Publik</u>			
	103.0500.09.010	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan	- Kinerja Aparatur Terhadap Pelayanan Publik Semakin Meningkat	Kegiatan	3
5	<u>103.0500.35</u>	<u>Program Pengembangan Kinerja</u> <u>Pembangunan Air Minum dan</u> <u>Air Limbah</u>			
	103.0500.35.007	Penyediaan Sarana Air Limbah	- Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sanitasi	Paket	6
	103.0500.35.015	Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan	- Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air di Perdesaan	Paket	62
	103.0500.35.018	Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air	- Tersusunnya Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Air	Paket	7
6	<u>103.0500.36</u>	<u>Program Pengembangan Wilayah</u> <u>Perbatasan</u>			
	103.0500.36.008	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	- Tersusunnya data Identifikasi Sarana Prasarana pada kawasan perbatasan yang akurat dan relevan	Paket	8
7	<u>103.0500.37</u>	<u>Program Pengembangan Wilayah</u> <u>Strategis dan Cepat Tumbuh</u>			
	103.0500.37.004	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	- Tersusunnya data Identifikasi Sarana Prasarana pada kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Paket	7
	103.0500.37.005	- Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman Sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	- Informasi data Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana yang akurat pada kawasan pesisir	Paket	4

No.	Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Hasil/Keluaran	Satuan	Sasaran
8	103.0500.38	<u>Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan Dan Drainase</u>			
	103.0500.38.004	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase	- Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase	Paket	28
9	104.0500.15	<u>Program Pengembangan Perumahan</u>			
	104.0500.15.012	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar	- Terjangkaunya harga rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Paket	3
	104.0500.15.021	Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Kawasan Agro Politan Jawa Timur	- Pembangunan sarana prasarana Infrastruktur usaha tani	Paket	4
	104.0500.15.022	Pembangunan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman	- Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman yang lebih Baik	Paket	28
	104.0500.15.046	Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus	- Perbaikan jalan/saluran lingkungan Permukiman pada Kawasan Khusus	Paket	13
	104.0500.15.050	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	- Tersedianya Rusunawa yang sehat Memenuhi kebutuhan masyarakat Akan hunian yang layak bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Paket	3
	104.0500.15.051	Dana Pendamping PNPM	- Adanya Evaluasi Pelaksanaan PPIP Perdesaan dan PNPM Perkotaan	Paket	4
	104.0500.15.056	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah Prov. Jatim	- Pembangunan dan Renovasi Gedung Negara yang memadai	Paket	22
	104.0500.15.062	Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	- Pembuatan Dokumen Laporan tentang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dokumen	30
	104.0500.15.075	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman	- Berkembangnya Laboratorium Perumahan dan Permukiman DPU Cipta Karya & Tata Ruang Prov.Jatim	Paket	4
	104.0500.15.076	Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman.	- Makin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi teknologi bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur.	Paket	7
	104.0500.15.078	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi	- Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Perumahan dan Permukiman - Terbinanya pelaku Jasa Konstruksi	Orang	525

No.	Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Hasil/Keluaran	Satuan	Sasaran
10	<u>105.0500.15</u>	<u>Program Perencanaan Tata Ruang</u>			
	105.0500.15.037	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	- Tersusunnya RTR dan Rencana Revitalisasi Kawasan di Jawa Timur	Paket	8
	105.0500.15.042	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	- Sosialisasi dan Pembinaan Penataan Ruang	Orang	302
	105.0500.15.054	Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur	- Tersusunnya RTR Kawasan Strategis di Jawa Timur	Paket	2
11	<u>105.0500.17</u>	<u>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</u>			
	105.0500.17.005	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	- Tercapainya Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten / Kota	Kab / Kota	38
	105.0500.17.006	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Tercapainya Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten / Kota	Kab / Kota	38
	105.0500.17.007	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Tercapainya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Orang	50

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 menargetkan Pendapatan Daerah Setelah Perubahan

Sebesar	Rp. 1.103.000.000,00
Realisasi Anggaran sebesar	Rp. 1.383.396.738,56
atau sebesar :	125,42%

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 mendapatkan Anggaran Belanja Setelah Perubahan

Sebesar	Rp. 120.795.204.000,00
Realisasi Anggaran sebesar	Rp. 112.511.016.700,00
atau sebesar :	93,14%

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Jumlah Anggaran tahun 2014 setelah perubahan	Rp. 16.815.427.000,00
- Jumlah Realisasi Belanja Gaji	Rp. 12.918.111.973,00
- Jumlah Realisasi Belanja Non Gaji	Rp. 3.202.751.600,00
- Sisa Anggaran	Rp. 694.563.427,00
atau sebesar :	95,87 %

2. BELANJA LANGSUNG

- Jumlah Anggaran tahun 2014 setelah perubahan ..	Rp. 103.979.777.000,00
- Jumlah Realisasi Belanja	Rp. 96.390.153.127,00
- Sisa Anggaran	Rp. 7.589.623.873,00
atau sebesar :	92,70 %

Adapun rincian Belanja sesuai Program Kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung	
Dana sebesar	Rp. 16.815.427.000,00
telah terealisasi sebesar	Rp. 16.120.863.573,00
atau sebesar :	95,87 %

Belanja ini terdiri dari :

- Belanja Gaji mendapat alokasi dana sebesar .	Rp.	13.424.006.000,00
terrealisasi sebesar.....	Rp.	12.918.111.973,00
atau sebesar :		96,23 %
- Belanja Non Gaji mendapat alokasi dana sebesar	Rp.	3.391.421.000,00
terrealisasi sebesar	Rp.	3.202.751.600,00
atau sebesar :		94,96 %

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung mendapat alokasi dana	Rp.	103.979.777.000,00
terrealisasi sebesar	Rp.	96.390.153.127,00
atau sebesar :		92,70 %

terdiri dari :

1.Nomor Rekening : 1.03.0500.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.107. Administrasi Perkantoran

Dana sebesar	Rp.	322.000.000,00
Terealisasi /dibelanjakan sebesar	Rp.	318.250.000,00
atau sebesar :		98,84 %

Capaian Program : Peningkatan Pelayanan Publik

Keluaran : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil : Kinerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Kegiatan meningkat.

Sasaran : Peningkatan Pelaksanaan Teknis Kegiatan dalam Penatausahaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.Nomor Rekening 103.0500.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

07.098. Penyusunan Data Base SKPD Sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur.

Dana sebesar	Rp.	208.200.000,00
Terealisasi/dibelanjakan sebesar	Rp.	207.450.000,00
atau sebesar :		99,64 %

Capaian Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Keluaran : Penyusunan Data Base SKPD

Hasil : Penyusunan Data Base SKPD (Sesuai Hasil) Sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur.

Sasaran : Penyusunan Data Base Program Kegiatan dilingkungan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

3.Nomor Rekening 103.0500.09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

09.010. Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

Dana sebesar Rp. 5.935.127.000,00

Terealisasi/dibelanjakan sebesar Rp. 5.631.242.483,00

atau sebesar : 94,88 %

Capaian Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keluaran : Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik

Hasil : Kinerja Aparatur terhadap pelayanan Publik semakin meningkat

Sasaran : Peningkatan Pelayanan Administrasi Pembangunan

4.Nomor Rekening 103.0500.35

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

Dana sebesar Rp. 12.636.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakan sebesar..... Rp. 11.906.443.250,00

atau sebesar : 94,23 %

Terdiri dari :

35.007. Penyediaan Sarana Air Limbah

Dana sebesar Rp. 1.401.775.000,00

Terealisasi/dibelanjakan sebesar..... Rp. 1.371.298.000,00

atau sebesar : 97,83 %

Capaian Program : Memenuhi kebutuhan dan tersedianya sarana dan prasarana sanitasi

Keluaran : Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana sanitasi

Hasil : Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sanitasi

Sasaran : Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi di 6 lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

35.015. Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

Dana sebesar Rp. 10.147.025.000,00

Terealisasi/dibelanjakan sebesar..... Rp. 9.521.364.050,00

atau sebesar : 93,83. %

Capaian Program : Memenuhi kebutuhan dan tersedianya air bersih

Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih

Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih

Sasaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di 62 lokasi Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

35.018. Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

Dana sebesar Rp. 1.087.200.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.013.781.200,00

atau sebesar : 93,25 %

Capaian Program : Tersusunnya pendataan dan pemetaan daerah rawan air

Keluaran : Identifikasi dan pemetaan untuk penanganan daerah rawan air

Hasil : Tersusunnya dokumen kawasan rawan air

Sasaran : Tersusunnya dokumen kawasan rawan air di 7 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur

5.Nomor Rekening 103.0500.36

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

36.008.Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan.

Dana sebesar Rp. 957.200.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 918.130.100,00

atau sebesar 95,92 %

Capaian Program : Tersusunnya data Identifikasi Sarana Prasarana pada kawasan perbatasan

Keluaran : Tersusunnya data Identifikasi Sarana Prasarana pada kawasan perbatasan yang akurat dan relevan

Hasil : Identifikasi Sarana Prasarana Kebutuhan Infrastruktur Wilayah Perbatasan

Sasaran : Tersusunnya Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Perbatasan di 8 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

6.Nomor Rekening 103.0500.37

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Dana sebesar Rp. 1.843.798.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.773.671.500,00

atau sebesar : 96,20 %

Terdiri dari :

37.004. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dana sebesar Rp. 1.269.726.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.217.194.850,00

atau sebesar : 95,86 %

- Capaian Program : Tersusunnya Identifikasi Sarana Prasarana pada kawasan cepat tumbuh
- Keluaran : Tersusunnya data Identifikasi Sarana Prasarana infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh
- Hasil : Identifikasi Pengembangan Sarana Prasarana infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Sasaran : Tersusunnya Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di 11 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur

37.005. Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

Dana sebesar Rp. 574.072.000,00
 Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 556.476 650,00
 atau sebesar : 96,93 %

- Capaian Program : Tersusunnya data Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana pada Kawasan Pesisir
- Keluaran : Informasi data Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana yang akurat pada kawasan pesisir
- Hasil : Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir
- Sasaran : Tersusunnya Dokumen Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Infrastruktur Permukiman yang akurat pada kawasan pesisir di 4 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur

7. Nomor Rekening 103.0500.38.

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase :

38.004. Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/ Drainase

Dana sebesar Rp. 6.301.200.000,00
 Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 6.223.628.800,00
 atau sebesar : 98,77 %

- Capaian Program : Penanggulangan genangan pada kawasan permukiman
- Keluaran : Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
- Hasil : Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
- Sasaran : Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase di 28 lokasi Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

8.Nomor Rekening 104.0500.15

Program Pengembangan Perumahan

Dana sebesar	Rp. 71.676.252.000,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar.....	Rp. 65.793.356.759 ,00
atau sebesar :	91,79 %

Terdiri dari :

15.012. Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan atau Lingkungan Siap Bangun di Kota-kota Metropolitan dan Kota-kota Besar

Dana sebesar	Rp. 4.870.348.500,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar.....	Rp. 3.852.726.102,00
atau sebesar :	79,11 %

Capaian Program : Tercapainya kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keluaran : Mengurangi backlog rumah di Jawa Timur.

Hasil : Terjangkaunya harga rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sasaran : Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di 3 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

15.021. Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan /

Perbaikan Sarana Prasarana Kawasan Agropolitan Jawa Timur

Dana sebesar	Rp. 469.499.500,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar.....	Rp. 456.756.000 ,00
atau sebesar :	97,29 %

Capaian Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani

Keluaran : Pembangunan Jalan Usaha Tani

Hasil : Pembangunan Sarana Prasarana/infrastruktur Usaha Tani.

Sasaran : Terbangunnya jalan usaha tani lembaga desa yang terdapat di 3 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

15.022. Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman

Dana sebesar	Rp. 3.663.584.000,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar.....	Rp. 3.569.707.400,00
atau sebesar :	97,44 %

Capaian Program : Tercapainya Peningkatan kualitas hidup Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang lebih baik.

Keluaran : Terbangunnya Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman yang lebih baik.

Hasil : Pembangunan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman.
Sasaran : Pembangunan dan Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman sebanyak 28 Lokasi yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

15.046. Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus

Dana sebesar Rp. 1.447.023.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.408.491.000,00

atau sebesar : 97,34 %

Capaian Program : Tersedianya sarana prasarana lingkungan permukiman yang lebih baik

Keluaran : Perbaikan lingkungan permukiman pada kawasan khusus.

Hasil : Perbaikan jalan/saluran lingkungan

Sasaran : Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman pada Kawasan Khusus di 13 Lokasi yang terdapat di wilayah Jawa Timur.

15.050. Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Dana sebesar Rp. 7.049.545.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 6.010.460.011,00

atau sebesar : 85,26 %

Capaian Program : Tersedianya rusunawa yang sehat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keluaran : Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang sehat dan layak huni.

Hasil : Terlaksanakannya Pengelolaan Rusunawa yang baik dan Gedung Rusunawa yang sehat.

Sasaran : Pembangunan, perbaikan dan pengelolaan Rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

15.051. Dana Pendamping PNPM

Dana sebesar..... Rp. 1.311.802.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.247.044.785,00

atau sebesar : 95,06 %

Capaian Program : Dana Pendamping PNPM sesuai dengan Program Pusat

Keluaran : Evaluasi Pelaksanaan PPIP Perdesaan dan PNPM Perkotaan

Hasil : Evaluasi Pelaksanaan PPIP Perdesaan dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Perkotaan.

Sasaran : Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan PPIP Perdesaan dan PNPM Perkotaan untuk memudahkan Pemantauan dalam Kebutuhan Pelaksanaan Program di 4 Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur

**15.056. Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah
Provinsi Jawa Timur**

Dana sebesar Rp. 47.659.450.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 44.640.105.525,00

atau sebesar : 93,66 %

Capaian Program : Tersedianya pembangunan gedung negara.

Keluaran : Pembangunan dan renovasi gedung negara.

Hasil : Pembangunan dan renovasi gedung negara yang memadai.

Sasaran : Tersedianya Pembangunan dan renovasi gedung negara yang memadai.

**15.062. Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi
Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur**

Dana sebesar Rp. 1.955.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.783.412.575,00

atau sebesar : 91,22 %

Capaian Program : Tersedianya laporan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Hasil : Dokumen Pendampingan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sasaran : Dokumen Pendampingan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 30 Lokasi yang berada di wilayah Jawa Timur.

**15.075. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan
Permukiman**

Dana sebesar Rp. 750.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 631.086.831,00

atau sebesar : 84,14 %

Capaian Program : Pengembangan teknologi tepat guna dapat menunjang pengembangan kawasan permukiman

Keluaran : Pengembangan SDM Laboratorium, Pengadaan Alat Laboratorium Air

Hasil : Berkembangnya Laboratorium Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Sasaran : Berkembangnya Laboratorium Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang tepat guna dapat menunjang pengembangan kawasan permukiman.

15.076. Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Dana sebesar Rp. 1.250.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.158.726.355,00

atau sebesar : 92,70 %

Capaian Program : Tersedianya data dan informasi teknologi tentang perumahan dan permukiman di Jawa Timur

Keluaran : Data-data, Informasi teknologi dan studi bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur

Hasil : Makin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi teknologi bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur.

Sasaran : Tersusunnya 5 dokumen informasi bidang perumahan dan permukiman serta 2 dokumen studi kabupaten/kota di Jawa Timur

15.078. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi

Dana sebesar Rp. 1.250.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp. 1.034.840.175,00

atau sebesar : 82,79 %

Capaian Program : Tersedianya Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Hasil : Terbinanya Pelaku Jasa Konstruksi

Sasaran : Tersosialisasinya Peraturan Undang-Undang Bidang Perumahan dan Permukiman kepada masyarakat.

9. Nomor Rekening 105.0500.15.

Program Perencanaan Tata Ruang.

Dana sebesar Rp. 3.700.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakan sebesar..... Rp. 3.293.904.265,00

atau sebesar : 89,02 %

Terdiri dari :

15.037. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Dana sebesar Rp. 1.680.000.000,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 1.545.657.930,00
atau sebesar : 92,00 %

Capaian Program : Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan.

Keluaran : Tersusunnya RTR dan Rencana Revitalisasi Kawasan di Jawa Timur

Hasil : Tersedianya RTR dan Rencana Revitalisasi Kawasan di Jawa Timur

Sasaran : Tersusunnya Dokumen RTR dan Rencana Revitalisasi Kawasan untuk
8 tempat yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur .

15.042. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Dana sebesar Rp. 520.000.000,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 463.006.375,00
atau sebesar : 89,04 %

Capaian Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Keluaran : Sosialisasi dan Pembinaan Penataan Ruang.

Hasil : Peningkatan Sumberdaya Manusia.

Sasaran : Terlaksanakannya Sosialisasi dan Pembinaan Penataan Ruang
sebanyak 3 kegiatan utama dibidang Tata Ruang.

15.054. Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur

Dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00
Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 1.285.239.960,00
atau sebesar : 85,68 %

Capaian Program : Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Keluaran : Tersusunnya RTR Kawasan Strategis di Jawa Timur.

Hasil : Tersedianya RTR Kawasan Strategis di Jawa Timur.

Sasaran : Tersusunnya 6 Dokumen RTR Kawasan Strategis yang terdapat di
Provinsi Jawa Timur.

10. Nomor Rekening 105.0500.17.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dana sebesar Rp. 400.000.000,00
Terealisasi/dibelanjakan sebesar..... Rp. 324.075.970,00
atau sebesar : 81,02 %

Terdiri dari :

17.004. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Dana sebesar Rp. 100.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 99.204.730,00

atau sebesar : 99,20 %

Capaian Program : Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Hasil : Tercapainya Pelatihan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran : Pemahaman Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota akan Pengendalian Pemanfaatan Ruang akan meningkat.

17.005. Pengawasan pemanfaatan ruang

Dana sebesar Rp. 100.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 66.492.315,00

atau sebesar : 66,49 %

Capaian Program : Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota.

Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota.

Hasil : Tercapainya Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota

Sasaran : Pengawasan Pemanfaatan Ruang di 38 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan baik.

17.006. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Dana sebesar Rp. 100.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 58.881.500,00

atau sebesar : 58,88 %

Capaian Program : Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota.

Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Hasil : Tercapainya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Sasaran : Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota di 38 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan baik.

17.007. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Dana sebesar Rp. 100.000.000,00

Terealisasi/dibelanjakansebesar..... Rp 99.497.425,00

atau sebesar : 99,50 %

Capaian Program : Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Hasil : Tercapainya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Sasaran : Pemahaman Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang akan meningkat

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Kegiatan-kegiatan yang progress fisiknya mendapat kendala antara lain:

A. Program Pengembangan Perumahan

Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Anggaran dengan tingkat penyerapan yang rendah adalah anggaran untuk Belanja Jasa Konsultansi dimana hal tersebut terjadi karena adanya 2 (dua) paket pekerjaan Jasa Konsultansi yang mengalami gagal lelang yang disebabkan pada saat tahap pra kualifikasi proses lelang, penyedia jasa konsultansi tidak ada yang memenuhi persyaratan dan tidak bisa dilakukan lelang ulang sebab tidak cukup waktu untuk pelaksanaan pekerjaannya.

B. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan untuk Belanja Jasa Konsultansi yang mengalami gagal lelang bahkan sudah dilakukan lelang ulang hingga 2 (dua) kali dan masih mengalami gagal lelang juga yang disebabkan pada saat tahap pra kualifikasi proses lelang, penyedia jasa konsultansi tidak ada yang memenuhi persyaratan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Disini entitas pelaporan adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah :

1. **Basis kas** : untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. **Basis akrual**: untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Nilai historis adalah aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan telah disesuaikan dengan Standart Akuntansi Pemerintahan yang ada.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 127 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang keciptakarya dan penataan ruang.

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, maka tujuan pembangunan bidang keciptakarya dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 3 (tiga) prioritas pembangunan yaitu :

- a. Penanggulangan kemiskinan.
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur.

c. Penataan ruang.

ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

VISI & MISI

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014, maka visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN, DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS. ”

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah :

- a. Menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang dalam rencana program & anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan keterpaduan multisektor.
- b. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi legalitas hukum.
- c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.
- d. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota.

- e. Melaksanakan bantuan teknis, pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Melaksanakan penelitian dan pengujian bahan dan material serta sosialisasi dan penyebaran informasi tentang standard teknik bangunan dan perumahan.
- g. Melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga kantor, tata usaha dan pembinaan kepegawaian, pelayanan informasi serta tata laksana organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Demikian catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur selama periode pelaporan Tahun 2014, harapan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik tentang jumlah sumber daya ekonomi yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai didalam usaha Pemerintah Propinsi Jawa Timur mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten/Kota.